

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 07 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional PER.05/MEN.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan perlunya pemantauan terhadap perkembangan dan proses pelaksanaan program/kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas agar lebih efektif, efisien, proporsional, dan berkesinambungan.

Pemantauan merupakan suatu pengamatan dan/atau pencermatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkala untuk menyediakan informasi tentang status perkembangan suatu program/kegiatan, serta mengidentifikasi permasalahan yang timbul dan merumuskan tindak lanjut yang dibutuhkan. Pemantauan dan evaluasi ini bertujuan untuk menjamin bahwa pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sehingga dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang. Hasil pemantauan pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan oleh setiap penanggung jawab kegiatan, diharapkan hasilnya dapat berguna untuk menentukan tingkat pencapaian dan optimalisasi kapasitas program/kegiatan agar terarah pada pencapaian sasaran sesuai dengan tujuannya. Selain itu, hasil pemantauan dapat dijadikan sebagai bahan masukan penyusunan laporan evaluasi kinerja dan bahan penyempurnaan penyusunan perencanaan dalam keberlangsungan program/kegiatan.

Pemantauan pelaksanaan program/kegiatan dilakukan dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012, tentang Pedoman Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran di Kementerian PPN/Bappenas. Dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tersebut dijelaskan antara lain bahwa setiap Unit Kerja Eselon I (UKE I) dan Unit Kerja Eselon II (UKE II) sebagai penanggung jawab kegiatan dan pelaksana kegiatan serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan (*self monitoring*). Hasil pemantauan tersebut disampaikan kepada Biro Perencanaan Organisasi dan Tata Laksana untuk disusun sebagai Laporan Pemantauan Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian PPN/Bappenas.

Laporan Pemantauan Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian PPN/Bappenas Bulan Maret 2014 akan menggambarkan hasil realisasi pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran di Kementerian PPN/Bappenas selama 3 (tiga) bulan pertama tahun 2014, dan laporan ini merupakan hasil akumulasi realisasi Bulan Januari sampai dengan Maret 2014.

## **B. TUJUAN**

Tujuan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas adalah:

1. Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program/kegiatan, baik fisik maupun keuangan dalam rangka menjamin konsistensi antara pelaksanaan dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program/kegiatan, baik terhadap tingkat perkembangan pelaksanaannya maupun manfaat yang ditargetkan dan hambatan atau kendala yang terjadi untuk diambil tindakan korektif sedini mungkin.
3. Untuk mendukung usaha penyempurnaan perencanaan berikutnya dengan menyediakan informasi tentang status perkembangan suatu program atau kegiatan yang sedang dilaksanakan, sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai secara efisien dan efektif.

## **C. DASAR DAN METODOLOGI PEMANTAUAN**

Pemantauan Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian PPN/Bappenas dilakukan berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah
2. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri Hibah
3. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor : 07 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional PER.05/MEN.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

4. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor Nomor 02/M.PPN/06/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman dan atau Hibah Luar Negeri Di Kementerian Negara PPN/Bappenas
5. Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2012, tentang Pedoman Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran di Kementerian PPN/Bappenas.
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2010-2014.
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 02 Tahun 2014 tentang Mekanisme Penyusunan Dokumen Perencanaan Serta Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah di Kementerian PPN/Bappenas
8. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.103/M.PPN/HK/12/2013 Tentang Pengangkatan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (SPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Satuan Kerja (BPA SATKER) Kementerian PPN/Bappenas dan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep.36/M.PPN/HK/04/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 103/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Penandatanganan SPM, PPK, dan BPA SATKER .
9. Petunjuk Pelaksanaan Sesmen PPN/Sestama No. 1/Juklak/Sesmen/02/2014 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran di Kementerian PPN/Bappenas
10. Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2014 Nomor: DIPA-055.01.1.017312/2014 untuk Satker Kementerian PPN/Bappenas dan DIPA-055.01.1.966009/2014 untuk Satker Pengelola Hibah MCC.

Laporan hasil pemantauan ini disusun sesuai dengan ketentuan dasar tersebut di atas dengan melakukan analisis deskriptif berdasarkan tabulasi/hasil pengolahan data realisasi penyerapan anggaran yang disampaikan oleh seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Biro Umum berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Selanjutnya dijelaskan mengenai hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan program/kegiatan dan proses pencairan dana.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APBN)**

#### **KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2014**

##### **A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010-2014**

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan visi, misi, serta tujuan organisasi di dalam Renstra 2010-2014. Visi tersebut adalah untuk **“mewujudkan Kementerian PPN/Bappenas yang andal, kredibel dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan peran-peran Kementerian PPN/Bappenas, adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas dalam rangka:
  - a. mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dengan daerah;
  - b. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
  - c. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
  - d. menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang.
3. Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas Kementerian PPN/Bappenas.

##### **B. TUJUAN DAN SASARAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS**

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kementerian PPN/Bappenas dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran dan indikator yang ingin dicapai sebagaimana dalam Tabel 1 berikut:

**TABEL 1**  
**TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR TAHUN 2014**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN**  
**PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1.	Terwujudnya rencana pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) yang berkualitas	Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antar-waktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan	1. % kesesuaian antara muatan rancangan RKP 2014 dengan RPJMN 2010-2014
			2. % kesesuaian rancangan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) 2015 dengan rancangan RKP 2015
			3. % kesesuaian rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) 2015 dengan target dan sasaran rancangan RKP 2015
			4. % Sasaran Prioritas Nasional yang telah sesuai dengan rencana
			5. Pendapat <i>stakeholders</i> tentang proses penyusunan RKP 2015
2.	Terlaksananya koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya sesuai peran Kementerian PPN/Bappenas	Meningkatnya peran Kementerian PPN/Bappenas terkait koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya.	Tingkat Keberhasilan pelaksanaan koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya sesuai peran Kementerian PPN/ Bappenas.
3.	Tercapainya peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas	1. % pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian PPN/Bappenas melalui penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM
			2. % ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PPN/Bappenas
			3. Fasilitasi dan pembinaan SDM Aparatur perencana pusat dan daerah
			4. Akuntabilitas Laporan Keuangan
			5. Standar Penilaian <i>good governance</i>

Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut, maka ditetapkan target indikator kinerja (ukuran keberhasilan) yang akan dicapai melalui pelaksanaan program di Kementerian PPN/Bappenas pada tahun anggaran 2014 adalah sebagai berikut:

**TABEL 2**  
**PENETAPAN KINERJA**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN**  
**PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2014**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan (Kesesuaian RPJMN dan RKP 2014 dengan Renja dan RKA K/L 2014)	1. RPJMN 2010-2014 dan RKP tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 memiliki tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur	100%	Program Perencanaan Pembangunan Nasional	Unit Kerja Eselon I dan II di Kedepuitan
	2. % kesesuaian antara muatan rancangan RKP 2015 dengan RPJMN 2015-2019	100%		
	3. % kesesuaian rancangan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) 2015 dengan rancangan RKP 2015	100%		
	4. % kesesuaian rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) 2015 dengan target dan sasaran rancangan RKP 2015	100%		
	5. % sasaran Prioritas Nasional yang telah sesuai dengan rencana	100%		
	6. Pendapat <i>stakeholders</i> tentang proses penyusunan RKP 2015	Baik		
Meningkatnya peran Kementerian PPN/Bappenas terkait koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya	Tingkat keberhasilan pelaksanaan koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya sesuai peran Kementerian PPN/Bappenas	90%		
Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas	% pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian PPN/Bappenas melalui penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia	100%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PPN/Bappenas	Unit Kerja Eselon I dan II di Setmen PPN/Settama Bappenas dan Staf Ahli Menteri
	% fasilitasi dan pembinaan SDM aparatur perencana pusat dan daerah	100%		
	% ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PPN/Bappenas	80%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PPN/Bappenas	Setmen PPN/Bappenas (Biro Umum)
	1. Opini dari BPK atas Laporan Keuangan	WTP	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PPN/Bappenas	Unit Kerja Eselon I dan II di Inspektorat Utama Bappenas
	2. Standar penilaian <i>good governance</i>	Baik		

## **C. STRUKTUR PROGRAM DAN PENGELOLAAN ANGGARAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS**

### **1. Struktur Program Kementerian PPN/Bappenas**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2010-2014, disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan program-programnya sesuai RPJMN periode 2010-2014, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:

#### **a. Program Teknis**

Program Perencanaan Pembangunan Nasional.

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Kementerian PPN/Bappenas dalam proses perencanaan, pemantauan, evaluasi, kajian dan koordinasi kebijakan pembangunan.

#### **b. Program Generik**

- 1) Program Generik 1: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.
- 2) Program Generik 2: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- 3) Program Generik3: Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur.

Dari berbagai program tersebut telah dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan baik yang mendukung tugas-tugas utama maupun tugas pendukung dalam melaksanakan kewenangan Kementerian PPN/Bappenas.

## **2. Struktur Pengelolaan Anggaran Kementerian PPN/Bappenas**

Struktur pengelolaan anggaran di Kementerian PPN/Bappenas dilaksanakan oleh 35 (tiga puluh lima) Satuan Kerja (Satker), yaitu 1 Satker Utama pada tingkat Sekretaris Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Sesmen PPN/Sestama Bappenas), 1 Satker Pengelolaan Hibah *Millenium Challenge Corporation* (MCC) dan 33 Satker pelaksanaan dana dekonsentrasi di setiap provinsi. Satuan Kerja utama Setmen PPN/Settama Bappenas tersebut merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yang dibantu oleh satu bendaharawan pengeluaran anggaran dan satu Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), serta beberapa orang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), baik PPK Program maupun PPK yang berada di setiap Unit Kerja Eselon I (UKE I) atau Kedeputusan. Selain itu, pada setiap PPK dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan Pejabat Pengadaan.

Susunan pengelola anggaran di Kementerian PPN/Bappenas tahun 2014 telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP. 103/M.PPN/HK/12/2013 Tanggal 30 Desember 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (SPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Satuan Kerja (BPA Satker) Kementerian PPN/Bappenas.

Dalam proses pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran, pengelola anggaran dan unit kerja pelaksana kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012, tentang Pedoman Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran di Kementerian PPN/Bappenas serta Petunjuk Pelaksanaan No. 2/Juklak/Sesmen/03/2014.

Dengan struktur pengelolaan anggaran tersebut diharapkan pelaksanaan program/kegiatan, pemantauan, dan pelaporan realisasi penyerapan anggaran akan menjadi suatu sinergi yang positif sehingga ada sinkronisasi antar struktur program dan kegiatan dengan struktur organisasinya.

Seperti telah dijelaskan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional, alokasi anggaran Kementerian PPN/Bappenas tahun 2014 terdiri dari 4 (empat) program, yaitu:

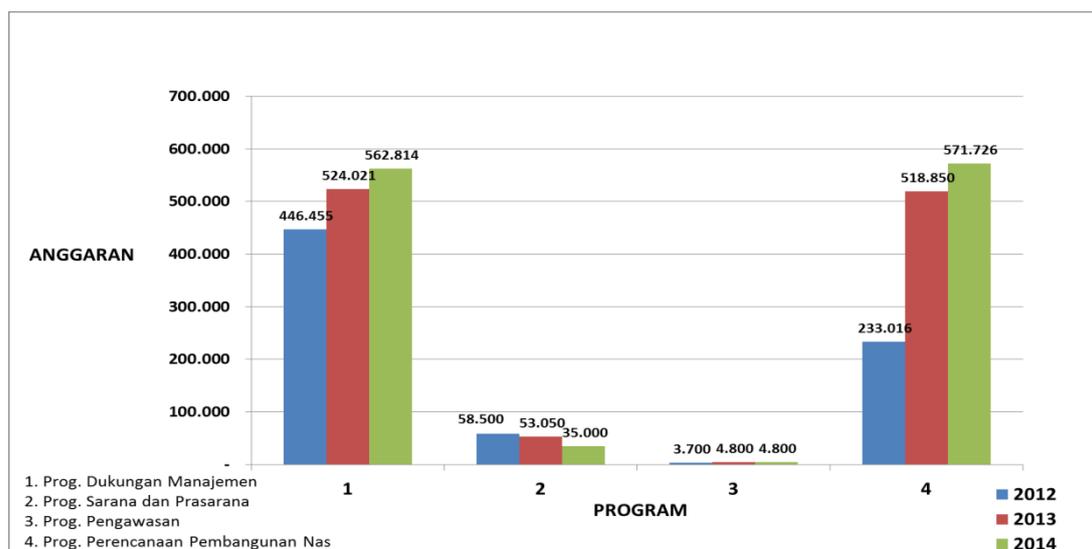
- 1) Program Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dikelola oleh 12 (dua belas) PPK Kedeputusan di lingkungan UKE I (Kedeputusan), dan oleh 33 Satker di 33 provinsi.

- 2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya, yang dikelola oleh 4 (empat) PPK di Sekretariat Menteri PPN/Sekretariat Utama Bappenas (Setmen PPN/Settama Bappenas).
- 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bappenas, yang dikelola oleh 1 (satu) PPK di Setmen PPN/Settama Bappenas.
- 4) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur, yang dikelola oleh 1 (satu) orang PPK di Inspektorat Utama.

#### D. ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2014

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas, pada tahun anggaran 2014 Kementerian PPN/Bappenas mendapat alokasi dana sebesar Rp. 1.174.339.869.000,- yang terdiri dana rupiah murni (RM) sebesar Rp. 612.708.469.000,-, pinjaman luar negeri (PLN) sebesar Rp. 290.682.900.000,- dan hibah luar negeri (HLN) sebesar Rp. 270.948.500.000,-. Alokasi anggaran tersebut naik 3,45% dari alokasi dana pada tahun 2013. Alokasi dana RM meningkat sebesar 7,36%, sedangkan dana pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) mengalami penurunan sebesar 0,81% dari alokasi tahun sebelumnya. Sementara itu alokasi dana dekonsentrasi pada tahun 2014 mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya. Berikut pada Gambar 1 terlihat perbandingan alokasi dana tahun 2012-2014.

**GAMBAR 1**  
**ALOKASI DANA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS 2012-2014**

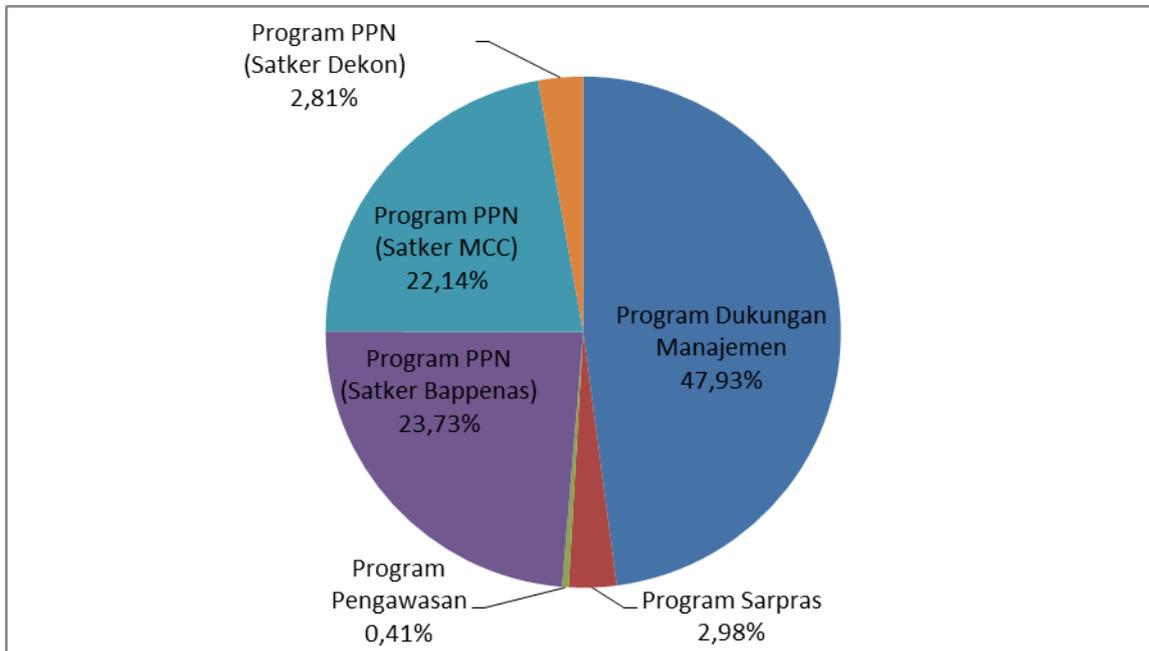


Anggaran Kementerian PPN/Bappenas dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan utama yang mendukung tercapainya sasaran strategis dan penetapan kinerja tahun 2014, yang terdiri dari 2 Satker di Kementerian PPN/Bappenas yang dikelola oleh 18 (delapan belas) PPK yang tersebar di masing-masing program, dan 33 Satker di 33 provinsi. Rincian alokasi anggaran Kementerian PPN/Bappenas tahun anggaran 2014 menurut program terdapat pada Tabel 3 dan porsi anggaran masing-masing program dapat dilihat pada Gambar 2.

**TABEL 3**  
**ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS**  
**TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	PROGRAM	ALOKASI DANA (dalam ribu)			
		RM	PLN	HLN	JUMLAH
<b>SATKER 017312</b>					
I	Perencanaan Pembangunan Nasional	184.490.030	74.287.000	19.948.500	278.725.530
II	Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Lainnya	345.418.469	216.395.900	1.000.000	562.814.369
III	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Bappenas	35.000.000	-	-	35.000.000
IV	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas	4.800.000	-	-	4.800.000
<b>JUMLAH</b>		<b>569.708.499</b>	<b>290.682.900</b>	<b>20.948.500</b>	<b>881.339.899</b>
<b>SATKER 966009</b>					
V	Perencanaan Pembangunan Nasional	10.000.000		250.000.000	260.000.000
<b>SATKER DANA DEKONSENTRASI (33 PROVINSI)</b>					
VI	Perencanaan Pembangunan Nasional	32.999.970	-	-	32.999.970
<b>TOTAL</b>		<b>612.708.469</b>	<b>290.682.900</b>	<b>270.948.500</b>	<b>1.174.339.869</b>

**GAMBAR 2**  
**PROPORSI ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS**  
**TAHUN ANGGARAN 2014**



Dari Tabel 3 dan Gambar 2 tersebut dapat diketahui bahwa Program Perencanaan Pembangunan Nasional (termasuk dana yang dikelola oleh Pengelola Hibah MCC dan satker pengelola dana dekonsentrasi di seluruh provinsi) merupakan program yang mempunyai alokasi dana terbesar diantara program-program yang lain, kemudian disusul Program Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Lainnya yang mengelola gaji, tunjangan serta kegiatan strategis yang melibatkan hampir semua unit kerja eselon I dan II.

Pada tahun 2014, khusus untuk dana PHLN di Kementerian PPN/Bappenas terdapat 11 (sebelas) PLN dan 8 (delapan) HLN, dengan nilai total sebesar Rp.590.381.391.000,- (termasuk dana rupiah pendamping untuk PHRDP III dan PHRDP IV), sebagaimana terdapat pada Tabel 4 berikut.

**TABEL 4**  
**ALOKASI ANGGARAN PHLN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS**  
**TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI	PAGU (dalam ribu)		
		RM/RMP	PLN/HLN	JUMLAH
<b>PINJAMAN LUAR NEGERI</b>		<b>18.749.991</b>	<b>290.682.900</b>	<b>309.432.891</b>
<b>Pusbindiklatren</b>		<b>15.723.001</b>	<b>216.395.900</b>	<b>232.118.901</b>
1	SPIRIT	0	140.406.346	140.406.346
2	PHRDP III	11.089.531	56.495.504	67.585.035
3	PHRDP IV	4.633.470	19.494.050	24.127.520
<b>Dit. Pengairan dan Irigasi</b>		<b>2.066.990</b>	<b>17.488.100</b>	<b>19.555.090</b>
1	<i>Water Resources and Irrigation Sector Management Project (WISMP) Phase II</i>	784.576	2.253.729	3.038.305
2	<i>Participatory Irrigation Rehabilitation and Improvement Management Project (PIRIMP)</i>	0	2.100.000	2.100.000
3	<i>Decentralized Irrigation System Improvement Project in Eastern Region of Indonesia - II (DISIMP - II)</i>	0	2.000.000	2.000.000
4	<i>Urban Flood Control System in Selected Cities</i>	0	2.472.270	2.472.270
5	<i>Dam Operation Improvement and Safety Project (DOISP)</i>	250.930	1.048.984	1.299.914
6	<i>Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program (ICWRMIP)</i>	1.031.484	7.613.117	8.644.601
<b>Dit. Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta</b>		<b>0</b>	<b>46.554.000</b>	<b>46.554.000</b>
1	<i>Infrastructure Reform Sector Development Project - IBRD Loan 2264-INO</i>		46.554.000	46.554.000
<b>Dit. Pengembangan Wilayah</b>		<b>960.000</b>	<b>10.244.900</b>	<b>11.204.900</b>
1	Koordinasi Strategis PNPM-PISEW – RISE I – RISE II	960.000	10.244.900	11.204.900
<b>HIBAH LUAR NEGERI</b>		<b>10.000.000</b>	<b>270.948.500</b>	<b>280.948.500</b>
<b>Biro SDM</b>		<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
1	Kegiatan IDF		1.000.000	1.000.000
<b>Dit. Agama, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga</b>		<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
1	<i>Kerjasama Pemerintah RI - UNDP dalam MDGs Roadmap: Support to the Acceleration of MDGs Achievement in Indonesia 2013-2015</i>	0	1.500.000	1.500.000
<b>Dit. Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak</b>		<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
1	<i>UNFPA Country Programme Eight 2011-2015 Program Cooperative Between The GOI-UNFPA</i>	0	1.500.000	1.500.000
<b>Dit. Kesehatan dan Gizi Masyarakat</b>		<b>0</b>	<b>4.311.500</b>	<b>4.311.500</b>
1	<i>Koordinasi Startegis Pengelolaan Program Kerjasama RI - Unicef 2011-2015</i>	0	1.543.417	1.543.417
2	<i>Koordinasi Pengelolaan Hibah Assistance For Rice Fortification For the Poor (Hibah JFPR : Assistance for Rice Fortification for the poor)</i>	0	2.768.083	2.768.083
<b>Dit. Energi, telekomunikasi, dan informatika</b>		<b>10.000.000</b>	<b>250.000.000</b>	<b>260.000.000</b>
1	<i>Millenium Challenge Corporation (MCC) Indonesia</i>	10.000.000	250.000.000	260.000.000
<b>Dit. Permukiman dan Perumahan</b>		<b>0</b>	<b>8.136.600</b>	<b>8.136.600</b>
1	<i>Slum Alleviation Policy And Action Plan/Sapola</i>	0	1.895.800	1.895.800
2	<i>Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi - PHLN</i>	0	6.240.800	6.240.800
<b>Dit. Lingkungan Hidup</b>		<b>0</b>	<b>3.285.800</b>	<b>3.285.800</b>
1	ICCTF	0	3.285.800	3.285.800
<b>Dit. Kerjasama Pembangunan Internasional</b>		<b>0</b>	<b>1.214.600</b>	<b>1.214.600</b>
1	<i>Strengthening Innovative Partnership For Development Cooperation (SIP-DC)</i>	0	1.214.600	1.214.600
<b>TOTAL PHLN</b>		<b>28.749.991</b>	<b>561.631.400</b>	<b>590.381.391</b>

## **1. Program Perencanaan Pembangunan Nasional**

Sasaran Program Perencanaan Pembangunan Nasional adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Kementerian PPN/Bappenas dalam proses perencanaan, pemantauan, evaluasi, kajian dan koordinasi kebijakan pembangunan. Untuk mendukung pencapaian sasaran program tersebut, pada tahun anggaran 2014 program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 571.725.500.000,- yang terdiri dari dana RM sebesar Rp. 227.490.000.000,- dan dana PHLN sebesar Rp. 344.235.500.000,-. Anggaran pada program ini meningkat sebesar 5,95% dari anggaran tahun 2013,-. Hal ini disebabkan adanya perpindahan dana dekonsentrasi dari Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya ke Program Perencanaan Pembangunan Nasional.

Alokasi anggaran Program Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan antara lain:

- 1) Penyusunan rencana pembangunan nasional dan pendanaan/penganggarnya, baik antarwaktu, sektor, wilayah maupun antartingkat/fungsi pemerintahan.
- 2) Pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional.
- 3) Evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional, dan kajian serta evaluasi kebijakan pembangunan sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau perumusan kebijakan pembangunan.
- 4) Koordinasi dalam melaksanakan perencanaan pembangunan nasional.

Khusus untuk penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah bertujuan untuk (1) memperkuat koordinasi perencanaan pusat dan daerah dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional dan (2) memperkuat koordinasi perencanaan prioritas pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka peningkatan kualitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional.

Pengelolaan anggaran Program Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut terbagi menjadi 3 Satker yang terdiri dari:

- 1) Satker 017312 yang dikelola oleh 11 (sebelas) PPK yang berada di UKE I Kedepatian (sebagaimana terdapat pada Tabel 5).
- 2) Satker 966009 yang dikelola oleh 1 (satu) PPK Pengelola Hibah MCC (sebagaimana terdapat pada Tabel 5).
- 3) Satker Dana Dekonsentrasi (33 Satker) di 33 provinsi (sebagaimana terdapat pada Tabel 6).

**TABEL 5**  
**ALOKASI ANGGARAN PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**  
**MENURUT PPK TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	PROGRAM	PAGU (dalam ribu)			JUMLAH
		RM/RMP	PLN	HLN	
1	PPK Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	17.270.000	-	7.311.500	24.581.500
2	PPK Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	13.693.342	-	-	13.693.342
3	PPK Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM	19.200.950	-	-	19.200.950
4	PPK Deputi Bidang Ekonomi	13.490.000	-	-	3.490.000
5	PPK Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	17.730.000	-	3.285.800	21.015.800
6	PPK Deputi Bidang Sarana dan Prasarana	14.932.440	-	8.136.600	23.069.040
7	PPK Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah	24.529.279	10.244.900	-	34.774.179
8	PPK Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan	15.060.000	-	1.214.600	16.274.600
9	PPK Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan	14.340.000	-	-	14.340.000
10	PPK Program Sumber Daya Air Terpadu	5.326.990	17.488.100	-	22.815.090
11	PPK Sekretariat <i>Infrastructure Reform Sector Development</i> Program	8.340.570	46.554.000	-	54.894.570
12	PPK Sekretariat Persiapan dan Pengembangan MCC	10.000.000	-	250.000.000	260.000.000
	<b>TOTAL</b>	<b>206.913.541</b>	<b>74.287.000</b>	<b>269.948.500</b>	<b>551.149.041</b>

**TABEL 6**  
**ALOKASI DANA DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS**  
**TAHUN 2014**

<b>NO</b>	<b>BAPPEDA</b>	<b>ALOKASI</b>
1	010025 -Bappeda Provinsi DKI Jakarta	799.290.000
2	020060 - Bappeda Provinsi Jawa Barat	838.290.000
3	030060 - Bappeda Provinsi Jawa Tengah	915.690.000
4	040069 - Bappeda Provinsi DIY	920.490.000
5	050060 - Bappeda Provinsi Jawa Timur	943.290.000
6	060004 - Bappeda Provinsi Aceh	1.045.290.000
7	070060 - Bappeda Provinsi Sumatera Utara	1.006.890.000
8	080019 - Bappeda Provinsi Sumatera Barat	958.890.000
9	090020 - Bappeda Provinsi Riau	962.490.000
10	100086 - Bappeda Provinsi Jambi	931.290.000
11	110060 - Bappeda Provinsi Sumatera Selatan	920.490.000
12	120022 - Bappeda Provinsi Lampung	882.090.000
13	130019 - Bappeda Provinsi Kalimantan Barat	949.290.000
14	140018 - Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah	960.690.000
15	150060 - Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan	961.290.000
16	160019 - Bappeda Provinsi Kalimantan Timur	1.006.290.000
17	170021 - Bappeda Provinsi Sulawesi Utara	1.079.490.000
18	180060 - Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah	1.080.090.000
19	190060 - Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan	1.008.090.000
20	200019 - Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara	1.027.890.000
21	210019 - Bappeda Provinsi Maluku	1.190.490.000
22	220060 - Bappeda Provinsi Bali	976.290.000
23	230020 - Bappeda Provinsi NTB	974.490.000
24	240026 - Bappeda Provinsi NTT	1.078.290.000
25	250060 - Bappeda Provinsi Papua	1.252.890.000
26	260070 - Bappeda Provinsi Bengkulu	940.290.000
27	280016 - Bappeda Provinsi Maluku Utara	1.167.090.000
28	290009 - Bappeda Provinsi Banten	823.290.000
29	300092 - Bappeda Provinsi Bangka Belitung	913.290.000
30	310060 - Bappeda Provinsi Gorontalo	1.063.890.000
31	320099 - Bappeda Provinsi Kepulauan Riau	955.290.000
32	330096 - Bappeda Provinsi Papua Barat	1.400.490.000
33	340030 - Bappeda Provinsi Sulawesi Barat	1.066.290.000
<b>TOTAL</b>		<b>32.999.970.000</b>

Alokasi dana dekonsentrasi tahun 2014 sebesar Rp. 32.999.970.000,- dengan sasaran penyelenggaraan dekonsentrasi penguatan sinergi pusat dan daerah di 33 provinsi dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Fasilitasi Perkuatan Koordinasi

Melaksanakan peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional yaitu:

- a) Pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
- b) Percepatan Pencapaian Tujuan Millenium di Indonesia.
- c) Sosialisasi, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.
- d) Sosialisasi, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi.
- e) Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia dengan fokus pada Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) dan *Pro Poor Planning And Budgeting Monitoring* (P3BM).
- f) Koordinasi dan Pelaporan Pemantauan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan (TP) Dan Urusan Bersama.

2. Fasilitasi Perkuatan Koordinasi Peningkatan Kualitas Musrenbangnas

Fasilitasi perkuatan koordinasi dalam rangka peningkatan kualitas muasyawarah perencanaan pembangunan nasional (Musrenbangnas) dan dokumen perencanaan dengan fokus pada:

- a) Koordinasi isu, program, dan kegiatan strategis masing-masing provinsi yang akan dibahas pada forum Musyawarah Pembangunan Nasional untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah yang dapat mencerminkan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- b) Koordinasi penilaian dan penghargaan terhadap dokumen perencanaan daerah.

**2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya**

Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya adalah untuk meningkatkan efektifitas penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan. Untuk mendukung

pencapaian sasaran program tersebut, pada tahun 2014 program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 562.814.369.000,- atau naik 10,18% dari tahun 2013. Alokasi ini terdiri dari dana RM sebesar Rp. 345.418.469.000,- (naik 15,02% dari alokasi tahun 2013) dan dana PHLN sebesar Rp. 216.395.900.000,- (meningkat 2,01 % dari alokasi tahun sebelumnya) yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan antara lain:

- 1) Peningkatan kapasitas instansi/unit perencanaan di pusat dan di daerah.
- 2) Penyempurnaan ketatalaksanaan.
- 3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Kementerian PPN/Bappenas dan aparatur perencana di instansi tingkat pusat dan daerah.
- 4) Peningkatan kualitas kehumasan dalam rangka membangun citra positif lembaga (*brand image building*).
- 5) Peningkatan kualitas sistem data dan informasi perencanaan pembangunan.
- 6) Pelaksanaan kegiatan pendukung lainnya.
- 7) Peningkatan intensitas kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi di pusat dan daerah.

Anggaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dikelola oleh 4 (empat) PPK di Setmen PPN/Settama Bappenas dan dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada lingkup masing-masing UKE II. Secara rinci alokasi anggaran tahun 2014 pada masing-masing PPK Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Lainnya (PPK DM) dapat dilihat pada Tabel 7.

**TABEL 7**  
**ALOKASI ANGGARAN**  
**PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANA TUGAS TEKNIS LAINNYA**  
**MENURUT PPK TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	PPK	PAGU ANGGARAN (dalam ribu)			
		RM	PHLN		TOTAL
			PLN	HLN	
I	PPK DM I	40.161.847			40.161.847
II	PPK DM II	26.018.830	-	1.000.000	27.018.830
III	PPK DM III	225.478.542	-		225.478.542
IV	PPK DM IV	54.759.250	216.395.900	-	271.155.150
<b>JUMLAH</b>		<b>345.418.469</b>	<b>216.395.900</b>	<b>1.000.000</b>	<b>562.814.369</b>

### **3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas**

Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas adalah meningkatnya akses sarana dan prasarana, penguasaan data/informasi dan teknologi informasi serta pemanfaatannya dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan nasional. Untuk mendukung pencapaian sasaran program tersebut, pada tahun 2014 program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 35.000.000.000,-. Alokasi ini mengalami penurunan sebesar Rp. 15.000.000.000,- dari alokasi tahun 2013.

Anggaran program ini dikelola oleh PPK Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bappenas berada di bawah pembinaan Sesmen PPN/Sestama Bappenas yang dilaksanakan oleh Biro Umum. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- 1) Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran.
- 2) Peningkatan Fasilitas Pelayanan Umum Dan Operasional.
- 3) Peningkatan Kualitas Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan.

### **4. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Bappenas**

Sasaran Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Bappenas adalah meningkatnya efektifitas sistem pengawasan dan audit serta sistem akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan aparatur Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan bebas Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN). Untuk mendukung pencapaian sasaran program tersebut, pada tahun 2014 program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 4.800.000.000,-.

Anggaran program ini dikelola oleh PPK Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara yang berada di bawah pembinaan Inspektur Utama dan dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada UKE I dan II di Inspektorat Utama, antara lain:

- 1) Monitoring/Pengawasan Pelaksanaan.
- 2) Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan.
- 3) Penyelenggaraan Sosialisasi/Workshop/Diseminasi/Seminar/Publikasi.
- 4) Penyelenggaraan/Penataan/Peningkatan Sistem Dan Prosedur Informasi Pengawasan.

- 5) Penyelenggaraan Pengawasan Dan Pemeriksaan Akuntabilitas Kementerian/Lembaga.
- 6) Peningkatan Intensitas dan Kualitas Pelaksanaan Pengawasan Dan Audit Internal Eksternal dan Pengawasan Internal.

#### **E. PERUBAHAN (REVISI) DIPA TAHUN2014**

Sampai dengan akhir triwulan I tahun2014, Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan perubahan/revisi DIPA, yang merupakan Revisi 1 pada tanggal 8 Februari 2014. Revisi ini dilakukan untuk realokasi antar akun dalam 1 (satu) kegiatan.

### BAB III

## REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2014

Sebagaimana dijelaskan di atas alokasi anggaran Kementerian PPN/Bappenas tahun 2014 secara keseluruhan sebesar Rp. 1.174.339.869.000,- yang terdiri dana RM sebesar Rp. 612.708.469.000,-, dana PLN sebesar Rp. 290.682.900.000,- dan HLN sebesar Rp. 270.948.500.000,-. Realisasi penyerapan anggaran (diluar pelaksanaan dana dekonsentrasi) sampai dengan Maret 2014 dari sebesar Rp. 1.141.339.899.000,- baru mencapai sebesar Rp. 78.975.357.583,- (6,92%), yang terdiri dari dana RM sebesar Rp. 51.632.277.210,- (8,91%), dana PLN sebesar Rp. 13.900.216.177,- (4,78%), dan HLN sebesar Rp. 13.442.864.196,- (4,96%). Sedangkan alokasi anggaran kegiatan Dekonsentrasi tahun 2014 sebesar Rp. 32.299.970.000,- dalam laporan ini belum dapat disampaikan hasil realisasi pelaksanaannya. Realisasi penyerapan anggaran tahun 2014 yang dilaksanakan dari masing-masing program secara rinci sebagaimana terdapat pada Tabel 8.

**TABEL 8**  
**REALISASI ANGGARAN SATKER KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS**  
**TAHUN ANGGARAN 2014**

PROGRAM	PAGU ANGGARAN			REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN					
	RM	PHLN	TOTAL	RM	%	PHLN	%	TOTAL	%
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA	345.418.469.000	217.395.900.000	562.814.369.000	34.615.023.885	10,02	13.758.605.427		48.373.629.312	8,59
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR BAPPENAS	35.000.000.000	-	35.000.000.000	334.844.000	0,96	-	-	334.844.000	0,96
PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR	4.800.000.000	-	4.800.000.000	539.086.971	11,23	-	-	539.086.971	11,23
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	194.490.030.000	344.235.500.000	538.725.530.000	16.143.322.354	8,30	13.584.474.946		29.727.797.300	5,52
JUMLAH	579.708.499.000	561.631.400.000	1.141.339.899.000	51.632.277.210	8,91	27.343.080.373	4,87	78.975.357.583	6,92

Secara rinci realisasi penyerapan anggaran tahun 2014 dari masing-masing program dijelaskan sebagai berikut:

#### **A. Program Perencanaan Pembangunan Nasional**

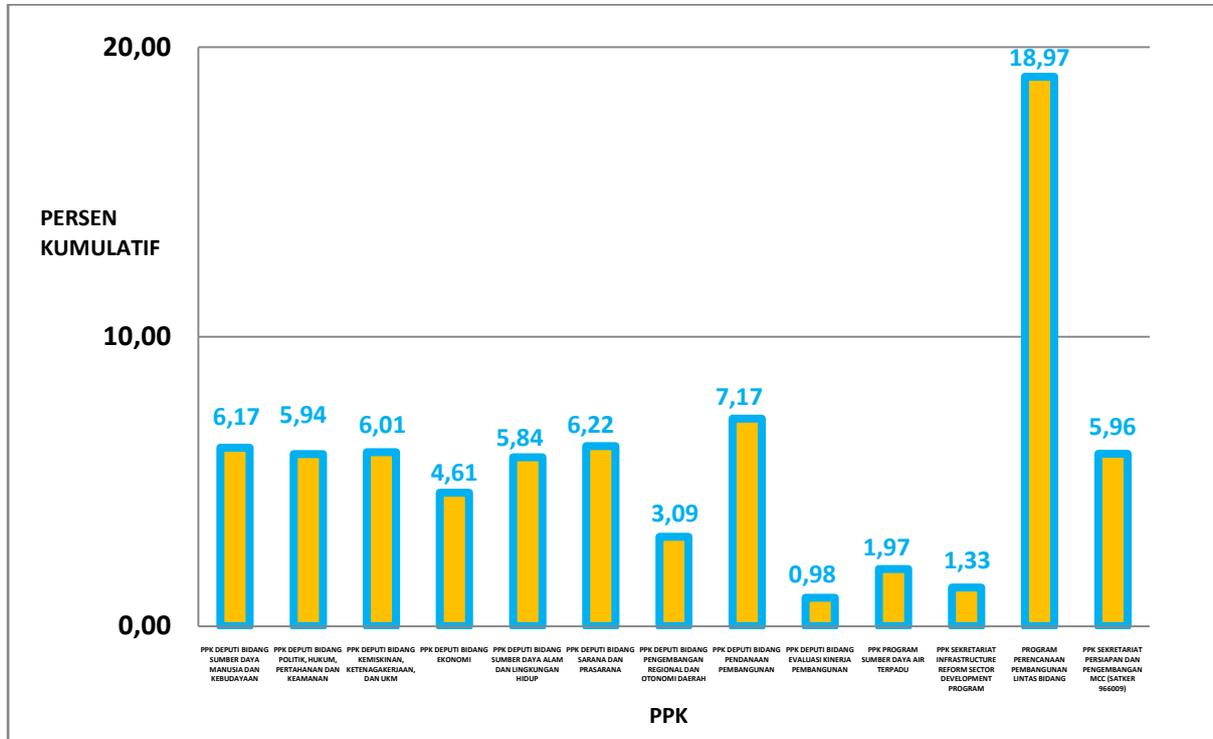
Alokasi anggaran Program Perencanaan Pembangunan Nasional untuk Satker Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2014 sebesar Rp. 538.725.530.000,- yang terdiri dari dana RM sebesar Rp. 194.490.030.000,-, dana PLN sebesar Rp. 74.287.000.000,-, dan HLN Rp. 269.948.500.000,-. Sampai dengan bulan Maret 2014, realisasi penyerapan anggaran baru mencapai Rp 29.727.797.000,- (5,52%).

Anggaran program ini dikelola oleh 13 (tiga belas) PPK yang berada di UKE I dengan rincianrealisasi penyerapan anggaran dan komposisinya sebagaimana terdapat pada Tabel 9 dan Gambar 3, serta penjelasannya sebagai berikut:

**TABEL 9**  
**REALISASI ANGGARAN PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN**  
**(NON DANA DEKOSENTRASI)**  
**TAHUN 2014**

NO	PROGRAM	PACU ANGGARAN				REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN										
		RM	PHLN			TOTAL	RM	%	PHLN				TOTAL	%		
			PLN	HLN	JUMLAH				PLN	%	HLN	%			JUMLAH	%
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	194.490.030.000	74.287.000.000	269.948.500.000	344.235.500.000	538.725.530.000	16.143.322.354	8,30	141.610.750		13.442.864.196		13.584.474.946		29.727.797.300	5,52
1	PPK DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	17.270.000.000	-	7.311.500.000	7.311.500.000	24.581.500.000	1.515.989.200	8,78	-		-		-		1.515.989.200	6,17
2	PPK DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN	13.693.342.000	-	-	-	13.693.342.000	813.895.010	5,94	-		-		-		813.895.010	5,94
3	PPK DEPUTI BIDANG KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN, DAN UKM	19.200.950.000	-	-	-	19.200.950.000	1.153.125.292	6,01	-		-		-		1.153.125.292	6,01
4	PPK DEPUTI BIDANG EKONOMI	13.490.000.000	-	-	-	13.490.000.000	621.557.026	4,61	-		-		-		621.557.026	4,61
5	PPK DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	17.730.000.000	-	3.285.800.000	3.285.800.000	21.015.800.000	1.226.736.393	6,92	-		-		-		1.226.736.393	5,84
6	PPK DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA	14.932.440.000	-	8.136.600.000	8.136.600.000	23.069.040.000	889.809.050	5,96	-		544.981.747	6,70	544.981.747	6,70	1.434.790.797	6,22
7	PPK DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL DAN OTONOMI DAERAH	24.529.279.000	10.244.900.000	-	10.244.900.000	34.774.179.000	1.074.425.063	4,38	-		-		-		1.074.425.063	3,09
8	PPK DEPUTI BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN	15.060.000.000	-	1.214.600.000	1.214.600.000	16.274.600.000	1.166.332.775	7,74	-		-		-		1.166.332.775	7,17
9	PPK DEPUTI BIDANG EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN	14.340.000.000	-	-	-	14.340.000.000	141.096.150	0,98	-		-		-		141.096.150	0,98
10	PPK PROGRAM SUMBER DAYA AIR TERPADU	5.326.990.000	17.488.100.000	-	17.488.100.000	22.815.090.000	308.710.100	5,80	141.610.750	0,81	-		141.610.750	0,81	450.320.850	1,97
11	PPK SEKRETARIAT INFRASTRUCTURE REFORM SECTOR DEVELOPMENT PROGRAM	8.340.570.000	46.554.000.000	-	46.554.000.000	54.894.570.000	732.604.420	8,78	-		-		-		732.604.420	1,33
12	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG	20.576.459.000	-	-	-	20.576.459.000	3.904.327.268	18,97	-		-		-		3.904.327.268	18,97
13	PPK SEKRETARIAT PERSIAPAN DAN PENGEMBANGAN MCC (SATKER 966009)	10.000.000.000	-	250.000.000.000	250.000.000.000	260.000.000.000	2.594.714.607	25,95	-		12.897.882.449	5,16	12.897.882.449	5,16	15.492.597.056	5,96

**GAMBAR 3**  
**REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**  
**MENURUT PPK TAHUN ANGGARAN 2014**



Realisasi penyerapan sampai dengan triwulan I tahun 2014 untuk PPK Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya I (PPK DM I) telah menyerap dana sebesar 18,97%, disusul oleh PPK Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan dengan penyerapan dana sebesar 7,17%, sedangkan penyerapan terkecil terdapat pada PPK Deputy Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan sebesar 0,98%.

### 1) PPK Deputy Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

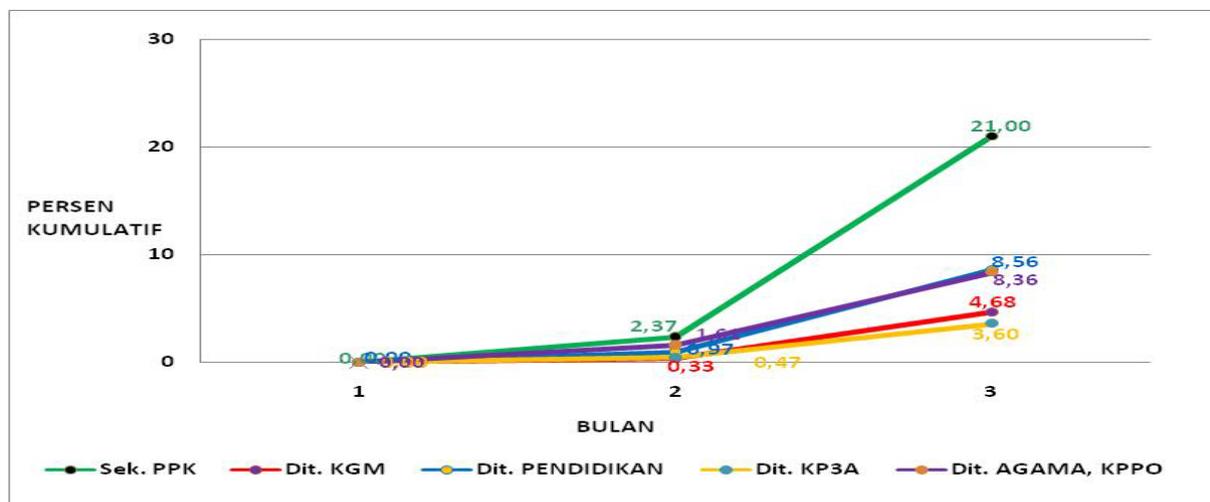
Alokasi anggaran PPK Deputy Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 24.581.500.000,- terdiri dari dana RM sebesar Rp. 17.270.000.000,- dan dana HLN sebesar Rp. 7.311.500.000,-. Sampai dengan akhir bulan Maret tahun 2014, realisasi penyerapan anggaran dari RM sebesar Rp. 1.515.989.200,- (6,17%) sebagaimana terdapat dalam Tabel 10.

**TABEL 10**  
**REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PPK DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**  
**TAHUN 2014**

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN			REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN					
		RM	PHLN	TOTAL	RM	%	PHLN	%	TOTAL	%
1	PPK DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	17.270.000.000	7.311.500.000	24.581.500.000	1.515.989.200	8,78	-	-	1.515.989.200	6,17
	a Sekretariat PPK Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan	360.000.000	-	360.000.000	75.583.300	21,00	-	-	75.583.300	21,00
	b Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat	4.900.000.000	4.311.500.000	9.211.500.000	431.160.700	8,80	-	-	431.160.700	4,68
	c Direktorat Agama dan Pendidikan	2.590.000.000	-	2.590.000.000	221.797.300	8,56	-	-	221.797.300	8,56
	d Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.770.000.000	1.500.000.000	5.270.000.000	189.869.900	5,04	-	-	189.869.900	3,60
	e Direktorat Agama Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	5.650.000.000	1.500.000.000	7.150.000.000	597.578.000	10,58	-	-	597.578.000	8,36

Dana HLN pada Kedepuitan Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan dipergunakan untuk kegiatan: 1) Kerjasama Pemerintah RI-UNDP dalam MDGs Roadmap: *Support to Accelaration of MDGs Achievmnt in Indonesia 2013-2015*, sebesar Rp. 1.500.000.000,- pada Direktorat Agama, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga; 2) *UNPFA Country Programme Eight 2011-2015 Program Cooperative Between The GOI-UNPFA* sebesar Rp. 1.500.000.000,- pada Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; 3) Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerjasama RI-Unicef 2011-2015 sebesar Rp. 1.543.417.000,- dan Koordinasi Pengelolaan Hibah *Assistance for Rice Fortification For the Poor* (Hibah JFPR) sebesar Rp. 2.768.083.000,- pada Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Perkembangan realisasi penyerapan dana setiap bulan di masing-masing unit kerja dapat terlihat pada Gambar 4.

**GAMBAR 4**  
**PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PPK DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**  
**TAHUN 2014**



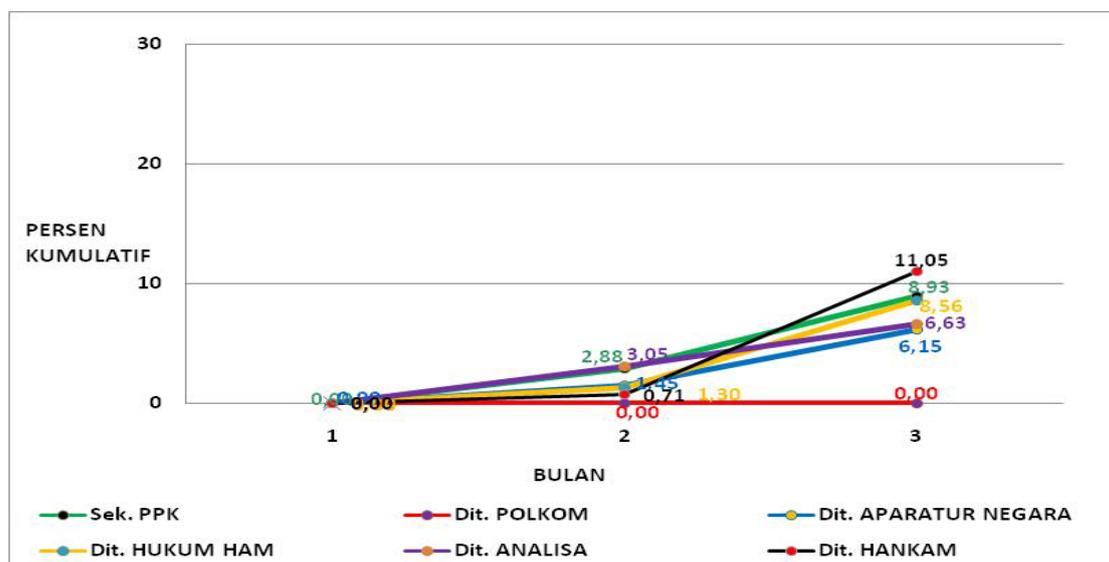
## 2) PPK Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

Alokasi anggaran PPK Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 13.693.342.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Maret 2014 sebesar Rp. 813.895.010,- (5,94%). Kegiatan yang dilaksanakan oleh UKE Ildi Kedeputusan Bidang Polhukhankam dalam rangka mendukung penyusunan rancangan kebijakan perencanaan pembangunan nasionalbidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan (RKP 2015) dan rencana pendanaan nasional di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan. Secara rinci realisasi penyerapan anggaran setiap UKE II terdapat pada Tabel 11 dan perkembangan realisasi penyerapan dana setiap bulan dapat terlihat pada Gambar 5.

**TABEL 11**  
**REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PPK DEPUTI BIDANG POLHUKHANKAM TAHUN 2014**

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN			REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN					
		RM	PHLN	TOTAL	RM	%	PHLN	%	TOTAL	%
2	PPK DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN	13.693.342.000	-	13.693.342.000	813.895.010	5,94	-	-	813.895.010	5,94
	a Sekretariat PPK Deputi Bidang Polhankam	775.360.000	-	775.360.000	69.263.500	8,93	-	-	69.263.500	8,93
	b Direktorat Politik dan Komunikasi	2.999.000.000	-	2.999.000.000	-	-	-	-	-	-
	c Direktorat Aparatur Negara	3.910.000.000	-	3.910.000.000	240.476.960	6,15	-	-	240.476.960	6,15
	d Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia	2.051.968.000	-	2.051.968.000	175.629.900	8,56	-	-	175.629.900	8,56
	e Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan	2.462.240.000	-	2.462.240.000	163.345.700	6,63	-	-	163.345.700	6,63
	f Direktorat Pertahanan dan Keamanan	1.494.774.000	-	1.494.774.000	165.178.950	11,05	-	-	165.178.950	11,05

**GAMBAR 5**  
**PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PPK DEPUTI BIDANG POLHUKHANKAM TAHUN 2014**



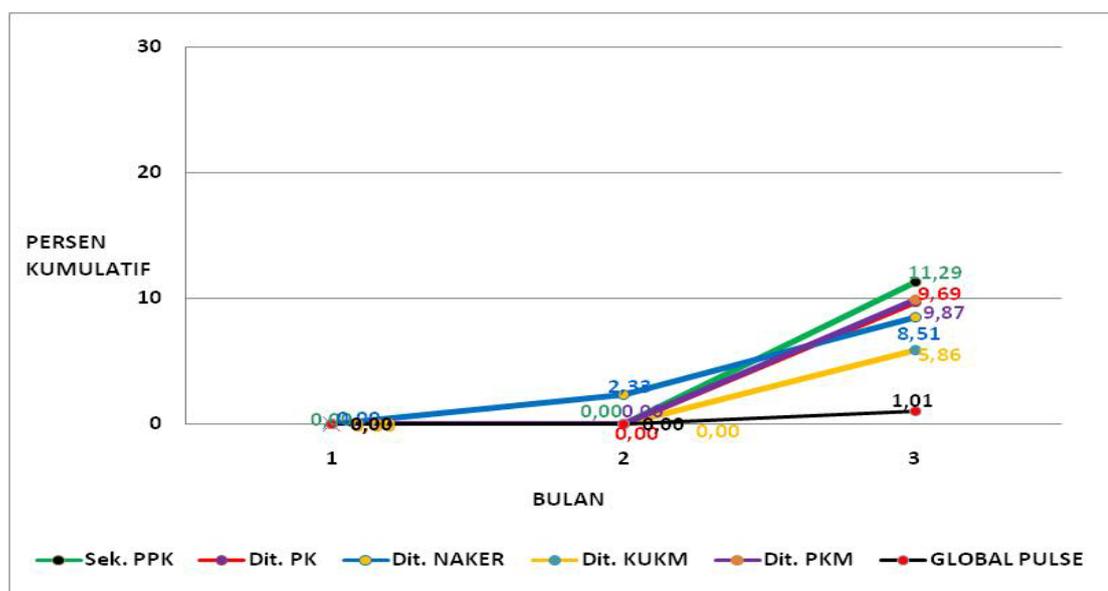
### 3) PPK Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah

Alokasi anggaran PPK Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 19.200.950.000,-, dengan realisasi penyerapan sampai dengan Maret 2014 sebesar Rp. 1.153.125.292,- (6,01%). Secara rinci realisasi penyerapan anggaran setiap UKE II terdapat pada Tabel 12 dan perkembangan realisasi penyerapan dana setiap bulan dapat terlihat pada Gambar 6.

**TABEL 12**  
**REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PPK DEPUTI BIDANG KKUKMTAHUN 2014**

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN			REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN					
		RM	PHLN	TOTAL	RM	%	PHLN	%	TOTAL	%
3	PPK DEPUTI BIDANG KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN, DAN UKM	19.200.950.000	-	19.200.950.000	1.153.125.292	6,01	-	-	1.153.125.292	6,01
a	Sekretariat PPK Dep. Bid. Kemiskinan, Ketenagakerjaan & UKM	900.000.000	-	900.000.000	101.645.732	11,29	-	-	101.645.732	11,29
b	Direktorat Penanggulangan Kemiskinan	3.250.000.000	-	3.250.000.000	315.000.000	9,69	-	-	315.000.000	9,69
c	Direktorat Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja	2.860.950.000	-	2.860.950.000	243.547.160	8,51	-	-	243.547.160	8,51
d	Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2.990.000.000	-	2.990.000.000	205.000.000	6,86	-	-	205.000.000	6,86
e	Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat	2.200.000.000	-	2.200.000.000	217.043.800	9,87	-	-	217.043.800	9,87
f	Global Pulse	7.000.000.000	-	7.000.000.000	70.888.600	1,01	-	-	70.888.600	1,01

**GAMBAR 6**  
**PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PPK DEPUTI BIDANG KKUKM TAHUN 2014**



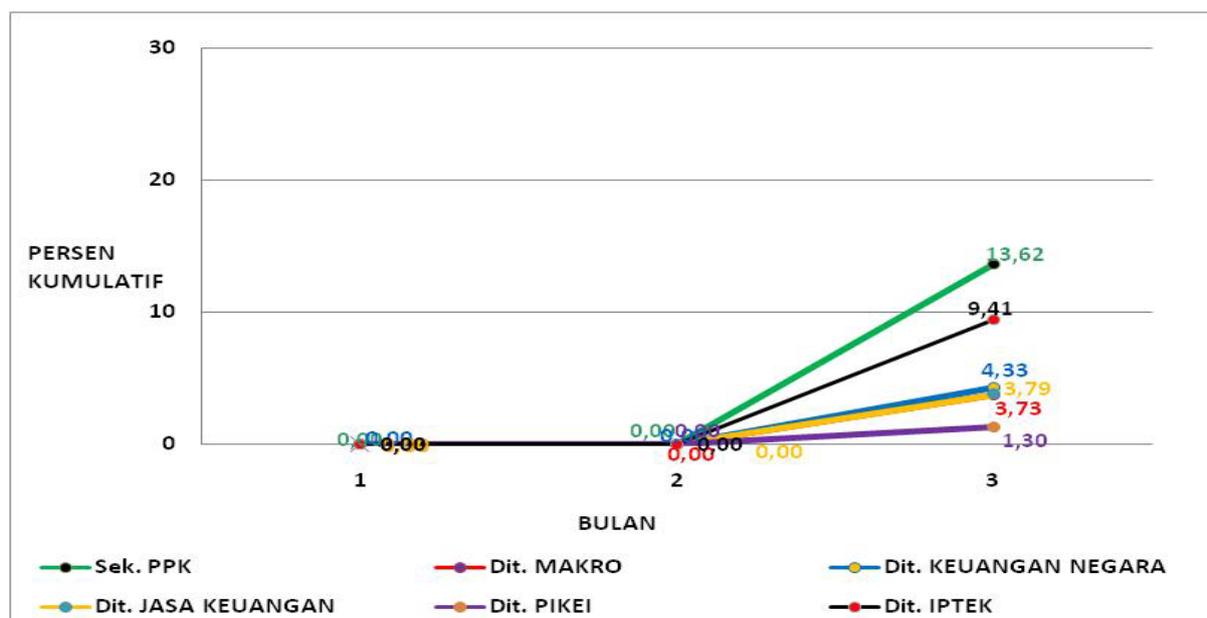
#### 4) PPK Deputi Bidang Ekonomi

Alokasi anggaran PPK Deputi Bidang Ekonomi pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp.13.490.000.000,- dengan realisasi penyerapan sampai dengan Maret 2014 sebesar Rp. 621.557.026,- (4,61%). Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan pada UKE II termasuk untuk kegiatan koordinasi kedeputian sebagaimana terdapat pada Tabel 13 dan dengan perkembangan realisasi penyerapan anggaran setiap bulan terlihat pada Gambar 7.

**TABEL 13**  
**REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PPK DEPUTI BIDANG EKONOMI TAHUN 2014**

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN			REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN					
		RM	PHLN	TOTAL	RM	%	PHLN	%	TOTAL	%
4	PPK DEPUTI BIDANG EKONOMI	13.490.000.000	-	13.490.000.000	621.557.026	4,61			621.557.026	4,61
a	Sekretariat PPK Deputi Bidang Ekonomi	238.000.000	-	238.000.000	32.411.600	13,62	-		32.411.600	13,62
b	Direktorat Perencanaan Makro	3.875.000.000	-	3.875.000.000	144.509.700	3,73	-		144.509.700	3,73
c	Direktorat Keuangan Negara	1.959.750.000	-	1.959.750.000	84.864.200	4,33	-		84.864.200	4,33
d	Direktorat Jasa Keuangan dan Analisa Moneter	2.200.000.000	-	2.200.000.000	83.362.524	3,79	-		83.362.524	3,79
e	Dir. Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional	2.642.250.000	-	2.642.250.000	34.229.999	1,30	-		34.229.999	1,30
f	Direktorat Industri, IPTEK, dan BUMN	2.575.000.000	-	2.575.000.000	242.179.003	9,41	-		242.179.003	9,41

**GAMBAR 7**  
**PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PPK DEPUTI EKONOMI TAHUN 2014**



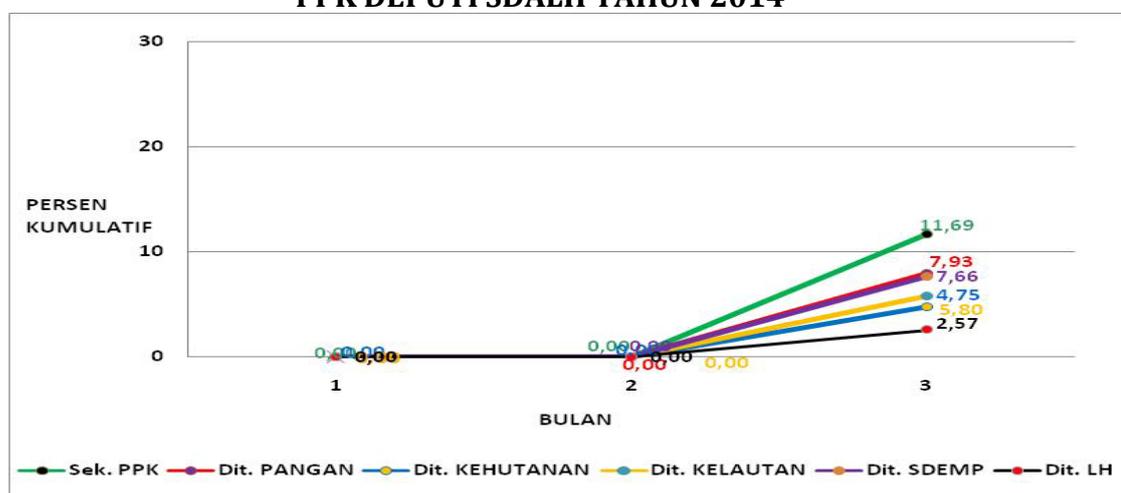
## 5) PPK Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Alokasi anggaran PPK Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp.21.015.800.000,-, yang terdiri dari dana RM sebesar Rp. 17.730.000.000,- dan dana HLN sebesar Rp. 3.285.800.000,-. Unit kerja yang mengelola dana HLN adalah Direktorat Lingkungan Hidup dengan dana sebesar Rp. 3.285.000.000,- yang merupakan dana hibah GTZ dengan kegiatan *Advisory Services for Climate Protection: Mainstreaming Climate Change International Development Planning Indonesia*, dan hibah dari UNDP dengan kegiatan *Support for Preparation Arrangement for Indonesia Climate Change Trust Fund (Per-ICCT)*. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir Maret 2014 baru mencapai sebesar Rp. 1.226.736.393,- (5,84%) untuk dana RM, sedangkan untuk dana HLN masih 0%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan pada UKE II termasuk untuk kegiatan koordinasi kedeputian sebagaimana terdapat pada Tabel 14 dan perkembangan realisasi penyerapan dana setiap bulan di masing-masing UKE II terlihat pada Gambar 7.

**TABEL 14**  
**REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PPK DEPUTI SDALHTAHUN 2014**

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN			REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN					
		RM	PHLN	TOTAL	RM	%	PHLN	%	TOTAL	%
5	PPK DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	17.730.000.000	3.285.800.000	21.015.800.000	1.226.736.393	6,92	-	-	1.226.736.393	5,84
a	Sekretariat PPK Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1.970.000.000	-	1.970.000.000	230.315.550	11,69	-	-	230.315.550	11,69
b	Direktorat Pangan dan Pertanian	3.620.000.000	-	3.620.000.000	287.145.984	7,93	-	-	287.145.984	7,93
c	Direktorat Kehutanan & Konservasi Sumber Daya Air	2.340.000.000	-	2.340.000.000	111.070.310	4,75	-	-	111.070.310	4,75
d	Direktorat Kelautan dan Perikanan	2.600.000.000	-	2.600.000.000	150.870.949	5,80	-	-	150.870.949	5,80
e	Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan	3.500.000.000	-	3.500.000.000	268.113.400	7,66	-	-	268.113.400	7,66
f	Direktorat Lingkungan Hidup	3.700.000.000	3.285.800.000	6.985.800.000	179.220.200	4,84	-	-	179.220.200	2,57

**GAMBAR 7**  
**PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PPK DEPUTI SDALH TAHUN 2014**



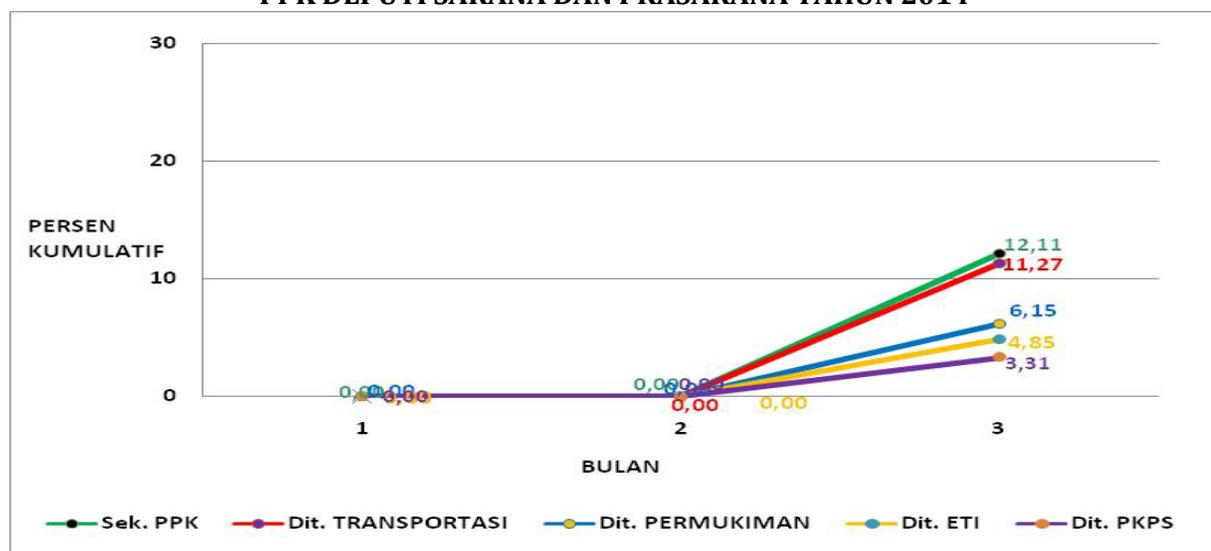
## 6) PPK Deputi Bidang Sarana dan Prasarana

Alokasi anggaran PPK Deputi Bidang Sarana dan Prasarana pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp.23.069.040.000,- yang terdiri dari dana RM sebesar Rp. 14.932.440.000,- dan dana HLN sebesar Rp. 8.136.600.000,-, Dana HLN dilaksanakan oleh Direktorat Pemukiman dan Perumahan untuk kegiatan *Slum Allevation Policy and Action Plan/Sapolase* sebesar Rp. 1.895.800.000,- dan kegiatan Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi sebesar Rp. 6.240.800.000,-. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Maret 2014 untuk dana RM sebesar Rp. 889.809.050,- (5,96%), dan dana hibah sebesar Rp. 544.981.747,- (6,70%). Secara rinci realisasi penyerapan anggaran setiap UKE II terdapat pada Tabel 15 dan perkembangan realisasi penyerapan dana setiap bulan dapat terlihat pada Gambar 8.

**TABEL 15**  
**REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PPK DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA TAHUN 2014**

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN			REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN					
		RM	PHLN	TOTAL	RM	%	PHLN	%	TOTAL	%
6	PPK DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA	14.932.440.000	8.136.600.000	23.069.040.000	889.809.050	5,96	544.981.747	6,70	1.434.790.797	6,22
	a Sekretariat PPK Deputi Bidang Sarana dan Prasarana	764.214.000	-	764.214.000	92.518.150	12,11	-	-	92.518.150	12,11
	b Direktorat Transportasi	3.185.786.000	-	3.185.786.000	358.976.730	11,27	-	-	358.976.730	11,27
	c Direktorat Pemukiman dan Perumahan	3.232.440.000	8.136.600.000	11.369.040.000	154.264.200	4,77	544.981.747	6,70	699.245.947	6,15
	d Direktorat Energi, Telekomunikasi, dan Informatika	1.800.000.000	-	1.800.000.000	87.268.100	4,85	-	-	87.268.100	4,85
	e Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta	5.950.000.000	-	5.950.000.000	196.781.870	3,31	-	-	196.781.870	3,31

**GAMBAR 8**  
**PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PPK DEPUTI SARANA DAN PRASARANA TAHUN 2014**



## 7) PPK Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah

Alokasi anggaran PPK Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah tahun 2014 sebesar Rp. 34.774.179.000,- yang terdiri dari dana RM sebesar Rp. 24.529.279.000,- dan dana PLN sebesar Rp. 10.244.900.000,-. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir Maret 2014 ini baru mencapai sebesar Rp 1.074.425.063,- (4,38%) untuk dana RM, sedangkan dana PLN masih 0% sebagaimana terdapat pada Tabel 16.

**TABEL 16**  
**REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PPK DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL DAN OTONOMI DAERAH**  
**TAHUN 2014**

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN			REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN					
		RM	PHLN	TOTAL	RM	%	PHLN	%	TOTAL	%
7	PPK DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL DAN OTONOMI DAERAH	24.529.279.000	10.244.900.000	34.774.179.000	1.074.425.063	4,38	-	-	1.074.425.063	3,09
	a Sekretariat PPK Deputi Bid. Pengembangan Regional & Otda	800.000.000	-	800.000.000	98.232.000	12,28	-	-	98.232.000	12,28
	b Direktorat Pengembangan Wilayah	7.294.322.000	10.244.900.000	17.539.222.000	130.270.520	1,79	-	-	130.270.520	0,74
	c Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal	4.090.000.000	-	4.090.000.000	375.897.000	9,19	-	-	375.897.000	9,19
	d Direktorat Otonomi Daerah	4.803.548.000	-	4.803.548.000	163.154.743	3,40	-	-	163.154.743	3,40
	e Direktorat Perkotaan dan Pedesaan	3.351.000.000	-	3.351.000.000	109.976.100	3,28	-	-	109.976.100	3,28
	f Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan	4.190.409.000	-	4.190.409.000	196.894.700	4,70	-	-	196.894.700	4,70

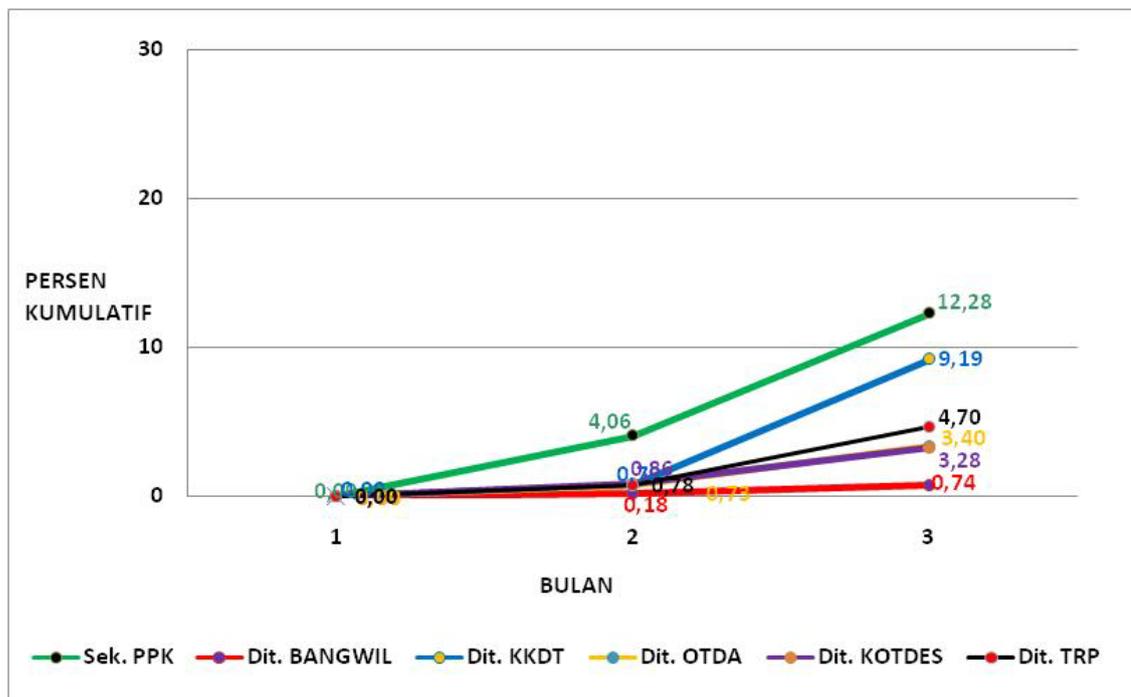
Alokasi pinjaman luar negeri terdapat pada Direktorat Pengembangan Wilayah dipergunakan untuk membiayai kegiatan dalam kegiatan *Regional Infrastructure for Social and Economic Development (RISE) I* atau Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW). Program PISEW dengan intervensi berupa bantuan teknis dan investasi infrastruktur dasar pedesaan, dibangun dengan berorientasi pada konsep *Community Driven Development (CDD)* dan *Labor Intensive Activities (LIA)*, sehingga kemudian dikategorikan sebagai salah satu program inti PNPM-Mandiri.

Kementerian PPN/Bappenas merupakan instansi penanggung jawab pinjaman JICA dengan Direktorat Pengembangan Wilayah sebagai tim pelaksana mengkoordinasikan instansi lainnya yaitu Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional dan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal. Sebagai instansi penanggung jawab, alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan PNPM-PISEW ini berada di Kementerian PPN/Bappenas.

Proyek pinjaman RISE I ini akan berakhir pada tahun 2014, dan pada tahun 2014 ini telah efektif pinjaman RISE II. Dana yang telah dialokasikan pada tahun 2014 ini untuk kedua proyek masing-masing sebesar Rp. 4.036.300.000,- untuk RISE I dan Rp. 6.208.600.000,- untuk RISE II. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program PISEW pada tahun 2014 adalah registrasi kegiatan dalam DIPA 2014 merupakan alokasi gabungan dari RISE I dan RISE II dan teregister dalam nama RISE I, sehingga perlu dilakukan revisi supaya pelaksanaan kegiatan tidak terganggu.

Perkembangan realisasi penyerapan dana setiap bulan di masing-masing unit kerja Kedepuitan Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah terlihat pada Gambar 9.

**GAMBAR 9**  
**PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PPK DEPUTI PENGEMBANGAN REGIONAL DAN OTONOMI DAERAH**  
**TAHUN 2014**



## 8) PPK Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan

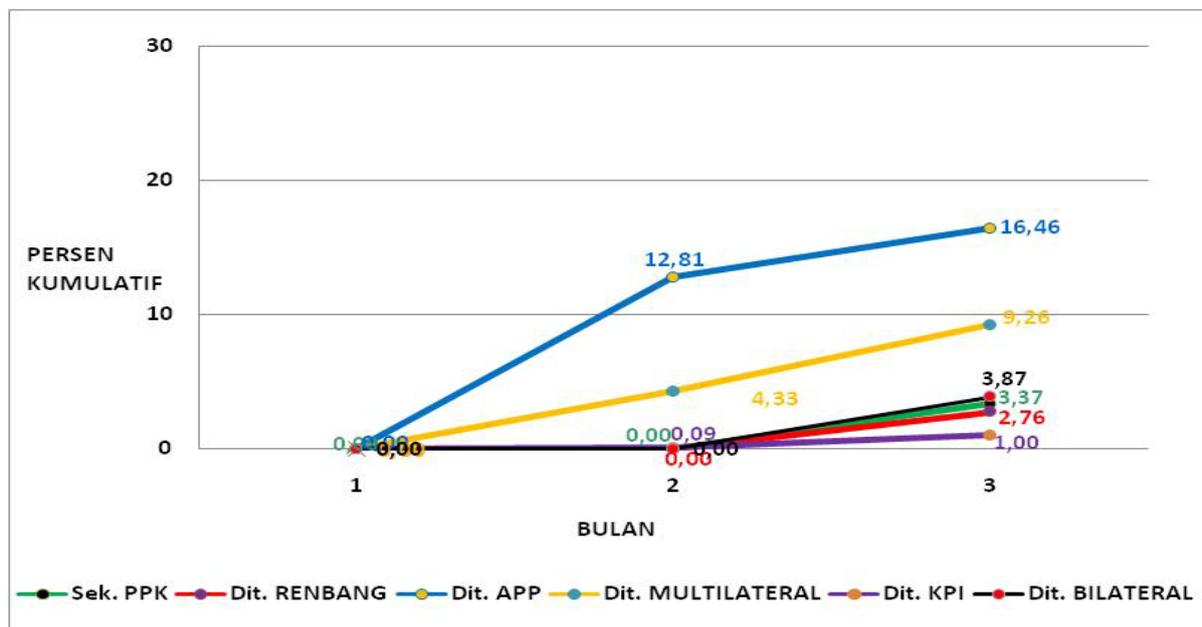
Dalam rangka melaksanakan kegiatan di Kedepuitan Bidang Pendanaan Pembangunan dalam rangka mendukung penyusunan rancangan kebijakan perencanaan pembangunan nasional bidang pendanaan pembangunan (RKP 2015) dan rencana pendanaan nasional. Kedepuitan Bidang Pendanaan Pembangunan pada tahun anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.16.274.600.000,- terdiri dari RM sebesar Rp. 15.060.000.000,- dan dana PHLN sebesar Rp. 1.214.600.000,- yang dilaksanakan oleh Direktorat Kerjasama Pembangunan Internasional untuk kegiatan *Strengthening Innovative Partnership For Development Cooperation* (SIP-DC). Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Maret 2014 mencapai sebesar Rp. 1.166.332.775,- (7,74%) untuk dana RM, sedangkan untuk dana PHLN masih 0% sebagaimana terdapat pada Tabel 17.

**TABEL 17**  
**REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PPK DEPUTI BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2014**

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN			REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN					
		RM	PHLN	TOTAL	RM	%	PHLN	%	TOTAL	%
8	PPK DEPUTI BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN	15.060.000.000	1.214.600.000	16.274.600.000	1.166.332.775	7,74	-	-	1.166.332.775	7,17
	a Sekr. PPK Deputi Bid. Pendanaan Pembangunan	898.637.000	-	898.637.000	30.300.000	3,37	-	-	30.300.000	3,37
	b Dir. Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan	1.939.464.000	-	1.939.464.000	53.545.000	2,76	-	-	53.545.000	2,76
	c Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan	4.436.048.000	-	4.436.048.000	730.361.875	16,46	-	-	730.361.875	16,46
	d Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral	2.493.700.000	-	2.493.700.000	231.034.900	9,26	-	-	231.034.900	9,26
	e Direktorat Kerjasama Pembangunan Internasional	3.347.500.000	1.214.600.000	4.562.100.000	45.797.000	1,37	-	-	45.797.000	1,00
	f Direktorat Pendanaan Luar Negeri Bilateral	1.944.651.000	-	1.944.651.000	75.294.000	3,87	-	-	75.294.000	3,87

Perkembangan realisasi penyerapan dana setiap bulan di masing-masing unit kerja Kedepuitan Bidang Pendanaan Pembangunan terlihat pada Gambar 10.

**GAMBAR 10**  
**PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PPK DEPUTI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2014**



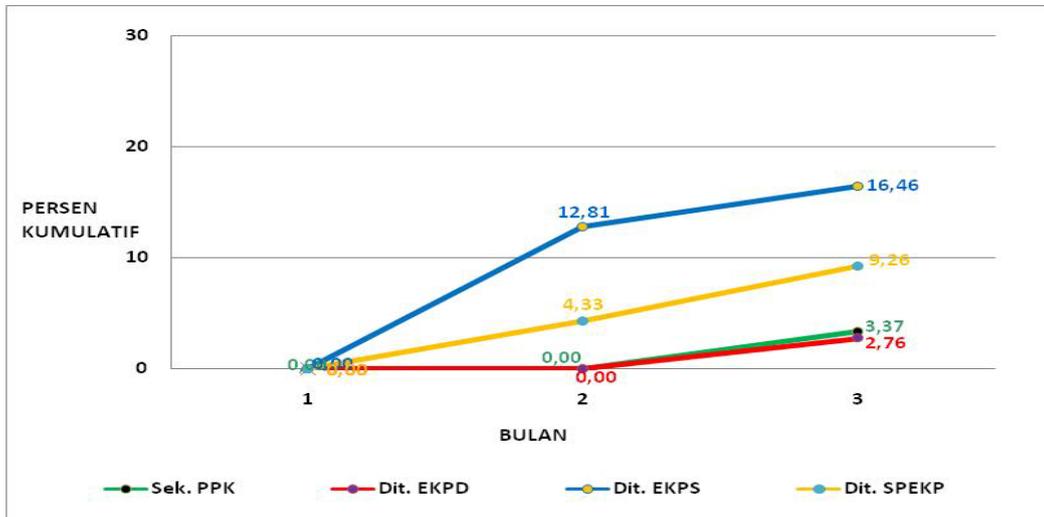
**9) PPK Deputy Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan**

Alokasi anggaran PPK Deputy Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 14.340.000.000,-, dengan realisasi penyerapan baru mencapai sebesar Rp. 141.096.150,-(0,98%). Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan pada UKE II termasuk untuk kegiatan koordinasi kedeputian. Secara rinci realisasi penyerapan anggaran setiap UKE II terdapat pada Tabel 18 dan perkembangan realisasi penyerapan dana setiap bulan dapat terlihat pada Gambar 11.

**TABEL 18**  
**REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PPK DEPUTI BIDANG EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2014**

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN			REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN					
		RM	PHLN	TOTAL	RM	%	PHLN	%	TOTAL	%
9	PPK DEPUTI BIDANG EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN	14.340.000.000	-	14.340.000.000	141.096.150	0,98			141.096.150	0,98
a	Sekretariat PPK Deputy Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan	250.000.000	-	250.000.000	14.000.000	5,60	-		14.000.000	5,60
b	Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	9.053.892.000	-	9.053.892.000	86.076.150	0,95	-		86.076.150	0,95
c	Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral	2.568.054.000	-	2.568.054.000	27.620.000	1,08	-		27.620.000	1,08
d	Direktorat Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan	2.468.054.000	-	2.468.054.000	13.400.000	0,54	-		13.400.000	0,54

**GAMBAR 11**  
**PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PPK DEPUTI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2014**



#### 10) PPK Program Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu

Alokasi anggaran PPK Program Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 22.815.090.000,- yang terdiri dari RM sebesar Rp. 5.326.990.000,- dan dana PLN sebesar Rp. 17.488.100.000,-, dengan realisasi penyerapan RM sampai dengan Maret 2014 sebesar Rp. 308.710.100,- (5,80%), sementara realisasi penyerapan dana PLN mencapai 0,81% atau sebesar Rp 141.610.750,- Dana program ini dialokasikan untuk kegiatan tentang pengairan dan irigasi di Direktorat Pengairan dan Irigasi, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana.

PPK Program Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu mengelola beberapa kegiatan yang berasal dari pinjaman luar negeri, yaitu: (1) *Water Resources and Irrigation Sector Management Project (WISMP) Phase II-WB* sebesar Rp. 2.253.729.000,-; (2) *Participatory Irrigation Rehabilitation and Improvement Management Project (PIRIMP)-ADB* sebesar Rp. 2.100.000.000,-; (3) *Decentralized Irrigation System Improvement Project in Eastern Region of Indonesia (DISMP II)-JICA* sebesar Rp. 2.000.000.000,-; (4) *Urban Flood Control System in Selected Cities-JICA* sebesar Rp. 2.472.270.000,-; (5) *Dam Operation Improvement and Improvement and Safety Project (DOISP)-WB* sebesar Rp. 1.048.984.000,-; dan (6) *Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program (ICWRMIP)* sebesar Rp. 7.613.117.000,-.

### **11) PPK Sekretariat *Infrastructure Reform Sector Development Program***

Alokasi anggaran tahun 2014 pada PPK Sekretariat *Infrastructure Reform Sector Development Program* sebesar Rp. 54.894.570.000,- yang terdiri dari dana RM sebesar Rp. 8.340.570.000,- dan dana PLN sebesar Rp. 46.554.000.000,- untuk melaksanakan kegiatan *Infrastructure Reform Sector Development (IRSDP)/ Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD)*. Realisasi penyerapan anggaran RM sampai dengan Maret 2014 sebesar Rp. 732.604.420,- (8,78%), sementara realisasi penyerapan dana PLN masih 0%.

Kegiatan P2MPD bertujuan memberikan bantuan teknis untuk memfasilitasi penyiapan proyek infrastruktur dengan mengikutsertakan sektor swasta, yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta dengan rincian kegiatan:

- a) Penyusunan Program dan Rencana Kerja Teknis/Program (IRSDP, Sekretariat WASAP, Koordinasi Perencanaan Infrastruktur, Sekretariat PPITA)
- b) Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan
- c) Pembinaan Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan
- d) Pengadaan Peralatan
- e) Monitoring dan Evaluasi

### **12) PPK Koordinasi Persiapan dan Pengembangan *Millennium Chalange Corporation (MCC)***

Alokasi anggaran PPK Koordinasi Persiapan dan Pengembangan *Millennium Chalange Corporation (MCC)* pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 260.000.000.000,-, terdiri dari dana RM sebesar Rp. 10.000.000.000,- dan dana HLN sebesar Rp. 250.000.000.000,-, dengan realisasi penyerapan dana RM mencapai sebesar Rp 2.594.714.607,- (25,95%), sementara realisasi penyerapan dana HLN mencapai 5,16%, atau sebesar Rp 12.897.882.449,- yang di bawah koordinasi Direktorat Energi, Telekomunikasi dan Informatika.

Tujuan kegiatan Koordinasi Persiapan dan Pengembangan *Millennium Chalange Corporation (MCC)* adalah pembentukan mekanisme koordinasi *Millennium Chalange Corporation-Indonesia Secretariat (MCC-IS)* mencakup berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) atau disingkat MC Indonesia dalam dalam rangka persiapan untuk kegiatan-kegiatan/proyek yang akan diajukan mendapat pendanaan ringkas (*Compact Funding*) dari MCC.

Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut, telah dilakukan koordinasi penyiapan usulan kegiatan untuk dibiayai dengan hibah MCC. Pada bulan Juni 2010, Pemerintah secara resmi telah menyampaikan *Concept Paper* yang berisi 13 (tiga

belas) usulan kegiatan yang merupakan hasil seleksi dari 338 usulan/proposal yang masuk ke Sekretariat MC Indonesia. Setelah pihak MCC Amerika Serikat melakukan assessment terhadap concept paper tersebut, diputuskan bahwa perlu dilakukan perubahan/perbaikan dengan mengembangkan ide/gagasan yang sudah ada. Pada tanggal 14 Desember 2010 telah ditandatangani MoU mengenai Pengembangan *Program Compact* dimana Pemerintah Amerika Serikat memberikan hibah kepada Pemerintah Indonesia senilai USD 12 juta terkait persiapan pelaksanaan kegiatan MCC *Compact Program*.

### **13) PPK Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya I**

Program Perencanaan Pembangunan Nasional yang berada dalam tanggung jawab PPK adalah Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang sebesar Rp 20.576.459.000,- untuk kegiatan Kajian dan Prakarsa Strategis Lintas Bidang sebesar Rp 17.400.000.000,- dan Sekretariat Dekonsentrasi dengan alokasi dana Rp 3.176.459.000,-. Sampai dengan akhir Maret 2014, realisasi penyerapan anggaran baru mencapai sebesar Rp 3.904.327.268,- (18,97%).

Pada pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam Program Perencanaan Pembangunan berjalan dengan baik. Permasalahan yang dihadapi dikarenakan antara lain dalam kurun waktu triwulan I sebagian besar kegiatan masih dalam tahap persiapan, dan masih terdapat penerapan aplikasi sistem perbendaharaan dan anggaran negara (SPAN) dari Kementerian Keuangan yang belum bisa optimal, sehingga mengakibatkan pencairan anggaran sedikit terganggu dan memerlukan waktu yang lebih lama. Selain itu, hal ini juga disebabkan adanya revisi DIPA yang memerlukan waktu yang relatif lama mulai dari proses penyampaian dari unit kerja yang akan melakukan perbaikan atas anggaran dan kegiatannya, sampai dengan proses penyelesaian revisinya.

### **B. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya**

Untuk mendukung pencapaian sasaran program, pada tahun 2014 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 562.814.369.000,- yang terdiri dari dana RM sebesar Rp. 345.418.469.000,- dan dana PHLN sebesar Rp 217.395.900.000. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Maret 2014 mencapai Rp. 48.373.629.312,- (8,59%) yang terdiri dari dana RM sebesar Rp. 34.615.023.885,- (10,02%), sedangkan dana PHLN sebesar Rp. 13.758.605.427,- (6,33%).

Anggaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dikelola oleh 4 (empat) PPK di Setmen PPN/Settama Bappenas dan dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada lingkup masing-masing UKE II. Secara rinci realisasi penyerapan anggaran pada masing-masing PPK dapat dilihat pada Tabel 19.

**TABEL 19**  
**REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA**  
**TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN			REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN					
		RM	PHLN	TOTAL	RM	%	PHLN	%	TOTAL	%
	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA	345.418.469.000	217.395.900.000	562.814.369.000	34.615.023.885	10,02	13.758.605.427	6,33	48.373.629.312	8,59
1	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS I	40.161.847.000	-	40.161.847.000	3.380.399.868	8,42	-	-	3.380.399.868	8,42
2	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS II	25.018.830.000	1.000.000.000	26.018.830.000	1.468.734.383	5,87	-	-	1.468.734.383	5,64
3	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS III	225.478.542.000	-	225.478.542.000	28.992.096.322	12,86	-	-	28.992.096.322	12,86
4	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS IV	54.759.250.000	216.395.900.000	271.155.150.000	773.793.312	1,41	13.758.605.427	6,36	14.532.398.739	5,36

Dari tabel diatas diketahui bahwa penyerapan dana Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya telah mampu mencapai sebesar 8,59% dari total alokasi tahun 2014. Pencairan dana baru bisa dilaksanakan pada bulan Februari 2014, kecuali untuk kegiatan pada PPK DM III dalam rangka pembayaran gaji dan tunjangan. Pusdatinrenbang yang mengelola lokasi dana terbesar di Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya termasuk didalamnya mengelola 3 pinjaman luar negeri, yaitu SPIRIT, PHRDP III dan PHRDP IV telah mampu menyerap dana 6,33%. Sementara Kegiatan IDF-*Strategic Management and Institutional Strengthening Project* yang dikelola oleh Biro Sumber Daya Manusia sampai dengan triwulan I 2014 ini belum melakukan penarikan dana. Hibah yang berasal dari Bank Dunia ini mempunyai pagu sebesar Rp 1.000.000.000,- pada DIPA 2014. Kemudian pada bulan Maret 2014, pengelola hibah mengusulkan penambahan pagu menjadi sebesar Rp. 2.729.770.000,- karena proyek ini tidak akan diperpanjang dan akan selesai pada tanggal 12 September 2014.

Seperti halnya dengan Program Perencanaan Pembangunan Nasional, pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya juga terkendala dengan aplikasi SPAN. Aplikasi SPAN yang belum sempurna, menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran beasiswa kepada karyasiswa yang sedang menuntut ilmu di negara lain. Keterlambatan pembayaran ini berdampak bagi karyasiswa mengingat biaya hidup di negara asing sangat tinggi.

### C. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas

Alokasi anggaran tahun 2014 pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas sebesar Rp. 35.000.000.000,- dikelola oleh PPK Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara, dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Maret 2014 sebesar Rp. 334.844.000,- (0,96%). Rendahnya penyerapan dana ini dikarenakan masih dilaksanakannya proses lelang, sehingga penarikan dana yang dilakukan baru untuk pembelian AC.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas melalui penyediaan sarana dan prasarana kerja aparatur termasuk penyediaan sistem informasi perencanaan pembangunan nasional, pengembangan sistem data/informasi perencanaan pembangunan, dan sistem data/informasi dalam pengelolaan aset (Barang Milik Negara). Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Kantor
- 2) Peningkatan Fasilitas Pelayanan Umum dan Operasional.
- 3) Peningkatan Kualitas Pendukung Pelayanan Umum dan Operasional.

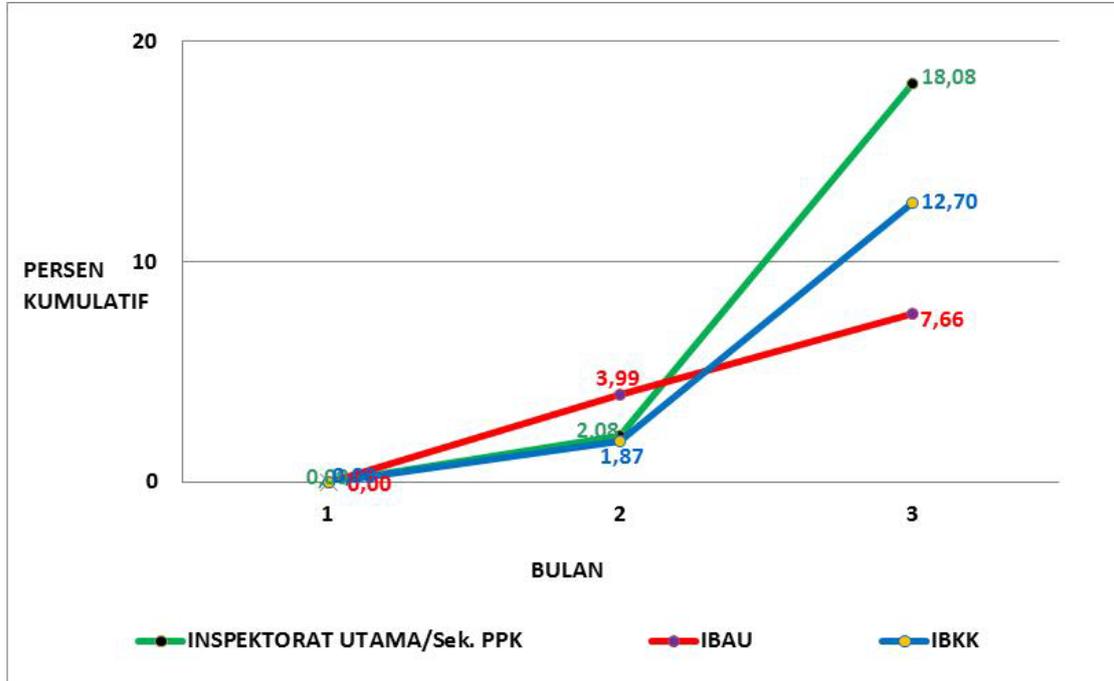
### D. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Bappenas

Alokasi anggaran tahun 2014 pada Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Bappenas sebesar Rp. 4.800.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Maret 2014 sebesar Rp. 539.086.971,- (11,23%) yang dikelola oleh PPK Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Bappenas. Anggaran program ini dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada lingkup masing-masing UKE II. Secara rinci realisasi penyerapan anggaran pada setiap unit kerja dapat dilihat pada Tabel 20 dan perkembangan realisasi setiap bulan pada Gambar 12.

**TABEL 20**  
**REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS**  
**APARATUR BAPPENAS TAHUN 2014**

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN			REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN					
		RM	PHLN	TOTAL	RM	%	PHLN	%	TOTAL	%
	PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR	4.800.000.000	-	4.800.000.000	539.086.971	11,23	-		539.086.971	11,23
a	Inspektorat Utama/Sekretariat PPK	775.000.000		775.000.000	140.096.343	18,08			140.096.343	18,08
b	Inspektorat Bidang Administrasi Umum	2.225.000.000		2.225.000.000	170.439.025	7,66			170.439.025	7,66
c	Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan	1.800.000.000		1.800.000.000	228.551.603	12,70			228.551.603	12,70

**GAMBAR 12**  
**PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PPK PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAWASAN AKUNTABILITAS**  
**APARATURBAPPENAS**  
**TAHUN 2014**



## **BAB IV KESIMPULAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan program/kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas sampai dengan Maret 2014, dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran Kementerian PPN/Bappenas pada tahun anggaran 2014 untuk Satker Kementerian PPN/Bappenas dan Satker MCC adalah sebesar Rp. 1.141.339.899.000,- yang terdiri dari dana RM sebesar Rp. 579.708.499.000,-, dan PHLN sebesar Rp. 561.631.400.000,-. Dari sejumlah dana tersebut, realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Maret 2014 baru mencapai sebesar Rp. 78.975.358.000,- (6,92%), yang terdiri dari dana RM sebesar Rp. 51.632.277.000,- (6,09%), dan dana PLN sebesar Rp. 13.900.216.000,- (4,78%) dan HLN sebesar Rp. 13.442.864.000,- (4,96 %). Penyerapan ini mengalami penurunan yang signifikan jika dibandingkan dengan penyerapan dana pada periode yang sama tahun lalu yang mampu menyerap dana sebesar 15,19%.
2. Realisasi penyerapan anggaran Kementerian PPN/Bappenas sampai dengan Maret 2014 masih sangat kecil, disebabkan antara lain:
  - a. Pelaksanaan semua kegiatan di masing-masing unit kerja masih dalam tahap persiapan.
  - b. Proses revisi/perubahan DIPA yang dilakukan beberapa kali, yang proses pengusulan dan pembahasan revisi cukup memakan waktu lama.
  - c. Terkendala sistem aplikasi SPAN Kementerian Keuangan yang belum berjalan dengan sempurna sehingga mengakibatkan waktu yang lebih lama dalam proses pencairan dana.
3. Permasalahan lain yang dihadapi dalam pelaksanaan dana PHLN antara lain:
  - a. Kurangnya kesadaran pengelola hibah untuk melakukan pencatatan dan pengesahan hibah serta baru melaksanakan pencatatan hibah langsung setelah kegiatan dilaksanakan pada tahun berjalan
  - b. Koordinasi antara PPK dan unit kerja pengelola hibah masih kurang efektif, sehingga terjadi miskomunikasi dalam pencatatan dalam laporan keuangan.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan hasil pemantauan tersebut di atas, maka dapat disampaikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Untuk mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada saat proses perencanaan, kepada semua unit kerja pelaksana kegiatan dan PPK disarankan:
  - a. Dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal atau rencana kerja yang telah disusun.
  - b. Agar dapat mempersiapkan lebih dini dalam menyusun legalisasi administrasi kegiatan antara lain berupa surat-surat keputusan dan data pendukung lainnya.
  - c. Mempelajari tatacara/pedoman dan peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan, proses pencairan anggaran, pelaporan kegiatan/program yang akan dilaksanakan.
  - d. Pencatatan kegiatan ke dalam DIPA perlu lebih diperhatikan sehingga tidak terjadi kesalahan register seperti MAK, kode kegiatan yang mengakibatkan perlu dilaksanakan revisi DIPA.
2. Untuk kelancaran proses pencairan, khususnya kepada pihak Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penerbit SPM serta para petugas pendukungnya agar dapat berkoordinasi dan memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada unit kerja yang mengusulkan (melalui PPK) jika terdapat hal-hal yang perlu segera diperbaiki/disempurnakan/diselesaikan dalam proses pengajuan usulan pencairan dana. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya keterlambatan proses pencairan sehingga waktu yang dibutuhkan dalam proses pencairan menjadi lebih cepat, dan sesuai dengan rencana.
3. Penyampaian laporan data realisasi penyerapan anggaran harus tetap konsisten berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) setiap bulannya (sampai dengan akhir bulan).
4. Perlu meningkatkan koordinasi dengan KPPN, Kanwil Perbendaharaan dan Ditjen Anggaran dalam aplikasi SPAN sehingga pencairan dana tidak mengalami keterlambatan.
5. Untuk pengelola pinjaman dan hibah luar negeri perlu untuk melaksanakan tertib administrasi.

Dalam Komitmen Jakarta yang telah disepakati pada awal tahun 2009 antara Pemerintah Indonesia dengan para mitra pembangunan luar negeri ditetapkan

suatu outcome bahwa seluruh hibah luar negeri pada tahun 2014 sudah harus direncanakan sesuai dengan mekanisme penganggaran pemerintah dan dicatatkan dalam laporan keuangan pemerintah pusat. Pencatatan hibah pada umumnya dipersiapkan dengan proses eksekusi yang lebih sempurna dibandingkan dengan kegiatan yang dibiayai dari perencanaan APBN. Oleh karena itu, maka pencatatan ini haruslah mencapai tingkat akuntabilitas yang baik dan memadai. Ini juga menjadi pembelajaran yang sangat penting untuk *quality spending* (kualitas belanja publik), walaupun nilai hibah luar negeri relatif kecil dibandingkan dengan dana rupiah yang dikelola pemerintah. Selain itu pencatatan hibah yang tertib juga turut andil dalam menciptakan kondisi pemerintah yang akuntabel.